

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ekonomi Indonesia merupakan lingkungan yang aktif, di mana setiap hari ribuan individu dan perusahaan terlibat dalam aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Tujuan dari kegiatan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat juga akan terpenuhi (Maulidah & Oktafia, 2020). Untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, diperlukan lapangan kerja yang memadai. Masyarakat diharapkan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individu serta wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan. Masyarakat yang mampu mengenali potensi diri dan lingkungan sekitarnya dapat menemukan serta memanfaatkan peluang usaha. Ini diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Dalam pertumbuhan ekonomi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang dikenal dengan istilah UMKM memegang peranan penting. UMKM memberikan kontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, dan menjadi penopang utama saat terjadi krisis ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2022) yang menyatakan bahwa peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB

juga mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok UMKM di Indonesia memang cukup mendominasi perekonomian Indonesia.

UMKM adalah kegiatan secara luas bagi masyarakat yang dapat memperluas lapangan kerja serta berperan dalam proses pemerataan pendapatan masyarakat dan berperan untuk mewujudkan stabilitas nasional. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan, UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pada prinsipnya penggolongan UMKM tersebut didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.

UMKM yang dikelola dengan baik tentunya akan mewujudkan sektor usaha yang stabil dan berkembang. Untuk mencapai sektor usaha yang stabil dan berkembang harus didukung dengan pemahaman literasi keuangan yang baik berkaitan dengan pencatatan atau pembukuan laporan keuangan usaha. Hal ini juga sependapat dengan Anggraeni (2015) pada objek penelitian UMKM di Depok menghasilkan bahwa tingkat literasi keuangan yang rendah mempengaruhi pemilik usaha dalam mengelola keuangan usaha dengan kemampuan yang hanya sebatas pada pencatat tetapi belum dilakukan dokumentasi yang baik untuk penerimaan dan pengeluaran. Begitu pula dengan hasil penelitian Yushita (2017) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan keuangan dengan perilaku keuangan

dimana semakin tinggi pengetahuan keuangan seseorang yang dimiliki akan cenderung lebih bijak dalam pengelolaan keuangannya.

Namun pada kenyataannya tingkat pemahaman literasi keuangan pelaku UMKM cenderung rendah. Salah satu permasalahan yang seringkali dialami pelaku usaha yaitu kurangnya pemahaman mengenai aturan dan prosedur yang berlaku terkait dengan pencatatan keuangan usaha seperti yang dikatakan oleh Hetika & Mahmudah (2017) bahwa kendala yang sering dihadapi pelaku UMKM karena masih rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pengetahuan terhadap teknologi informasi, sumber daya manusia yang masih kurang kompeten, dan juga lingkungan usaha yang masih tergolong kecil. Selanjutnya dikatakan juga oleh Manehat & Sanda (2022) bahwa alasan belumnya diterapkan laporan keuangan UMKM adalah karena ketidakpahaman pemilik usaha atas proses pencatatan, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta minimnya pendampingan dari pemerintah atau regulator.

Fitria et al. (2021) pada penelitiannya mengutip survei Bank Indonesia menyatakan, bahwa UMKM masih memiliki kinerja yang rendah dalam segi keterampilan dan kemampuan mengelola keuangan. Ketidakmampuan atau kurangnya pengetahuan dalam hal manajemen keuangan ini termasuk kurangnya keterampilan dalam pembuatan anggaran dan pembukuan akuntansi serta laporan keuangan. Selain itu juga pemilik masih mencampurkan uang pribadi dengan uang usaha. Akibatnya manajemen keuangan UMKM tidak tersusun secara rapi dimana transaksi penjualan tidak dapat dihitung secara pasti. Begitu juga dengan keuangan pribadi dari pemilik UMKM, akan menjadi

tidak teratur karena uang yang dikonsumsi tidak hanya dikonsumsi secara langsung tetapi juga menjadi modal bagi usaha. Hal ini akan mengakibatkan usaha yang dijalankan dapat tidak terlihat peningkatan kinerjanya.

Akuntansi berperan penting dalam kemajuan UMKM, karena dengan adanya pencatatan akuntansi yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan maka dapat membantu usaha kecil dalam pengambilan keputusan yang tepat, mempermudah kreditur maupun debitur dalam menyalurkan pembiayaan, serta dapat menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemilik UMKM atau pimpinan perusahaan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan bukan dengan berdasarkan asumsi semata (Irman & Azani, 2016).

Pentingnya laporan keuangan dibuat juga menjadi salah satu syarat untuk dapat mengajukan pinjaman kepada pihak bank agar dapat memperoleh tambahan modal. Namun seringkali ditemui pelaku UMKM yang tidak dapat membuat laporan keuangan karena mereka belum terbiasa untuk melakukan pencatatan dan penyusunan gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi merupakan sesuatu permasalahan yang ditemui oleh pelaku UMKM hal ini menjadi kendala. Terdapat beberapa UMKM yang telah menyusun laporan keuangan berdasarkan kas masuk dan keluar hingga membuat laporan keuangan sederhana namun masih belum mencantumkan beban pajaknya sehingga persentase pemahaman pelaku UMKM membuat laporan keuangan

masih rendah dengan diperkuat dengan berbagai macam permasalahan diatas (Rachmanti et al., 2019).

Melihat pentingnya akuntansi bagi pelaku UMKM, maka IAI menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Pada 17 Juli 2009, IAI menerbitkan SAK untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2011. Namun, standar ini masih dirasa sulit untuk diterapkan oleh pelaku UMKM sehingga IAI menyiapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang telah disahkan pada tanggal 24 Oktober 2016 dan diberlakukan efektif per 1 Januari 2018. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). SAK EMKM terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Adanya SAK EMKM diharapkan dapat membantu pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi yang ada saat ini. SAK EMKM diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam peningkatan literasi keuangan, memperingkas pelaporan keuangan, serta meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dipandang sebagai salah satu sektor penentu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara finansial

baik individu maupun kelompok, begitu juga yang di rasakan masyarakat wilayah Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Oleh karena itu, untuk mengetahui data Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdapat di Kota Kupang disajikan tabel berikut:

Tabel 1. 1
Data UMKM Kota Kupang Dampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu
Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Tahun (Unit)		
		2021	2022	2023
1	Alak	21	51	97
2	Kota Lama	19	40	77
3	Kota Raja	45	103	194
4	Maulafa	57	133	241
5	Oebobo	108	240	380
6	Kelapa Lima	51	118	204

Sumber: Pusat Layanan Usaha Terpadu NTT, Tahun 2024

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Nusa Tenggara Timur yang terdapat di Kota Kupang dari tahun 2021-2023 selalu mengalami peningkatan, dimana untuk tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 384 pelaku usaha dari tahun 2021, dan tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 508 pelaku usaha dari tahun 2022.

Kecamatan Oebobo dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Kupang memiliki jumlah pelaku usaha terbanyak pula yang bergabung dalam lembaga Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Nusa Tenggara Timur. Salah satu jenis usaha yang banyak tersebar di Kecamatan Oebobo ialah usaha kuliner. Saat ini usaha kuliner di Kecamatan Oebobo sedang mengalami perkembangan yang pesat, terutama karena tingginya permintaan akan berbagai jenis

makanan dari masyarakat. Peluang bisnis di sektor kuliner sangat menjanjikan karena makanan merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang di dukung dengan wilayah Kecamatan Oebobo memiliki pasar yang besar dan minat yang tinggi dari konsumen terhadap makanan dan minuman. Dengan peningkatan aktivitas wisatawan atau penduduk lokal, usaha kuliner dapat menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat setempat dan pengunjung. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan data jumlah UMKM di Kecamatan Oebobo bidang kuliner dampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Nusa Tenggara Timur yang semakin meningkat tiap tahun.

Tabel 1. 2
Data UMKM Kecamatan Oebobo Bidang Kuliner Dampingan Pusat
Layanan Usaha Terpadu Nusa Tenggara Timur
Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah UMKM (Unit)
2021	23
2022	45
2023	91

Sumber: Pusat Layanan Usaha Terpadu NTT, Tahun 2024

Pelaku usaha yang ada di Kota Kupang, jika ditinjau dari segi literasi berdasarkan realita, sebagian masyarakat masih diperhadapkan pada suatu permasalahan yaitu ketidakpahaman terhadap literasi atas implementasi SAK EMKM yang sesungguhnya. Sebab jika masyarakat memahami dengan baik makna dari literasi tentunya peran dari literasi dapat memberikan kemudahan bagi setiap pelaku UMKM untuk dapat menata, mengelola dan mencapai suatu usaha yang lebih baik.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu mengenai SAK EMKM yaitu Setyoko (2023) dalam penelitiannya

pada UMKM di Yogyakarta, penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Yogyakarta sudah melakukan pencatatan pembukuan yang dilakukan sebatas mencatat kas keluar dan kas masuk, sebagian UMKM sudah mengetahui dan mengimplementasi SAK EMKM, namun masih banyak juga yang belum mengetahui dan memahami adanya SAK EMKM. Peneliti lainnya yaitu Fitriana (2022) dalam penelitiannya pada pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga, hasil penelitian menunjukkan pelaku usaha cukup setuju dengan adanya penerapan SAK EMKM terhadap laporan, pelaku usaha belum sepenuhnya mengetahui SAK EMKM, dan masih rendahnya penggunaan informasi akuntansi terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMAHAMAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI PADA UMKM DI KECAMATAN OEBOBO DAMPINGAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU NUSA TENGGARA TIMUR)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman pelaku usaha kuliner dampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Nusa Tenggara Timur di Kecamatan Oebobo mengenai adanya penerbitan SAK EMKM?

2. Bagaimana tingkat keselarasan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan pelaku usaha kuliner dampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Nusa Tenggara Timur di Kecamatan Oebobo dengan SAK EMKM?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pelaku usaha kuliner dampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Nusa Tenggara Timur di Kecamatan Oebobo Kota Kupang dalam menyusun laporan keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pelaku usaha kuliner dampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Nusa Tenggara Timur di Kecamatan Oebobo mengenai penerbitan SAK EMKM.
2. Untuk mengetahui tingkat keselarasan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan pelaku usaha kuliner dampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Nusa Tenggara Timur di Kecamatan Oebobo dengan SAK EMKM.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pelaku usaha kuliner dampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Nusa Tenggara Timur di Kecamatan Oebobo Kota Kupang dalam menyusun laporan keuangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya informasi untuk memahami implementasi SAK EMKM pada suatu UMKM.

2. Bagi UMKM dampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu NTT di Kecamatan Oebobo

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM untuk menambah wawasan mengenai SAK EMKM yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan yang baik.